

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN FRANCIS DALAM MENANGANI PENINGKATAN XENOFobia MASYARAKAT DI FRANCIS**

#### **3.1 Prinsip Dasar Republik Prancis**

Prancis adalah negara Republik yang merdeka pada tanggal 14 Juli 1789. Prancis menjadi negara yang paling banyak memiliki keberagaman etnis di Eropa yang menjadikan minoritas juga berasal dari banyak keturunan (Library of Congress, 2007, p. 9). Prancis pada dasarnya adalah negara yang hanya mengakui eksistensi ras manusia (*human race*) bukan ras yang berbeda-beda. Prancis bahkan membatasi kebebasan untuk berbicara dengan tujuan untuk mengkriminalisasi siapapun yang melakukan pembicaraan mengenai kebencian dalam berbagai aspek. Dengan keadaan tersebut tentu sulit membayangkan negara Prancis menyimpan sentimen xenofobia. Tetapi pada kenyataannya sikap masyarakat sulit untuk dikendalikan. Seorang penulis di Prancis beralah dari Maroko, Tahar Ben Jelloun mengatakan bahwa Prancis merupakan negara yang paling xenofobik dibandingkan dengan negara di Eropa lainnya (Poirier, 2013).

Prancis adalah negara republik yang mengedepankan tiga pilar sebagai pendekatan terhadap imigran (Liogier, 2009, pp. 29-30):

1. Sekuler yang berarti segala aktivitas praktik budaya dan agama yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi selalu dihargai oleh negara dan negara tidak akan mengintervensi terhadap aktivitas tersebut.
2. Hak individu lebih utama dibandingkan hak kolektif yang berarti tidak ada hak kelompok yang terpisah seperti komunitas etnis atau minoritas

didiskriminasi atau bahkan diakui oleh Prancis. Prancis hanya melihat masyarakat sebagai individu saja dan bukan kelompok.

3. Adanya pemisahan antara bidang publik dengan bidang swasta serta penekanan pada peran inklusi sosial dari sekolah-sekolah yang ada di setiap penjuru Prancis.

Pendekatan ini telah ditetapkan dari tahun 1905 lalu. Dengan ketiga prinsip tersebut, Prancis ingin mencapai tujuan negaranya yaitu masyarakat homogen yang tinggi tanpa ada pemisah antar kelompok. Setiap masyarakat Prancis harus menghargai ketiga hal tersebut. Begitu pula dengan pendatang baru yang ingin menetap sebagai warga negara Prancis. Pendatang tersebut harus berusaha untuk berintegrasi bersama dengan masyarakat asli Prancis.

Integrasi juga menjadi suatu hal yang penting dimiliki oleh baik masyarakat Prancis maupun pendatang. Namun sebelum berintegrasi, para pendatang harus berusaha untuk mendapatkan naturalisasi kewarganegaraan terlebih dahulu. Naturalisasi penduduk dapat dilakukan dalam kurun waktu lima tahun. Dalam waktu tersebut, para pendatang harus melakukan segala prosesnya hingga mendapatkan suaka yang diinginkan. Sementara itu, ketika berada di Prancis, pemerintah memberikan kebijakan bahwa setiap pendatang baru dengan izin satu tahun dapat melakukan masa pembaruan kartu izin setiap tahunnya hingga diberikannya kartu izin 10 tahun (Migrant Integration Policy Index, 2015).

Pada awal dari proses lima tahun tersebut utamanya satu tahun pertama, para pendatang harus melakukan kontrak integrasi atau Contract of Integration (CAI) yang bersifat mandatory dan telah disediakan oleh pemerintah. Hal tersebut

agar usaha naturalisasi yang dilakukan oleh para pendatang dapat diawasi CAI ketika dilakukannya perpanjangan izin tinggal oleh para pendatang setiap tahunnya.

Kebijakan ini menyediakan beberapa bantuan bagi para pendatang seperti:

1. Formasi kewarganegaraan. Akan adanya presentasi seputar negara Prancis mengenai nilai yang dimiliki oleh Prancis hingga peran-peran lembaga pemerintahan.
2. Formasi linguistik. Pendatang dapat mengejar Pendidikan di Prancis hingga ke jenjang diploma dan akan mendapat pengakuan pendidikan secara formal oleh negara.
3. Ringkasan kompetensi profesional. Imigran dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pekerjaan.

CAI ini merupakan kebijakan bagi setiap pendatang baru. Namun tetap ada masyarakat yang dapat menjadi warganegara tanpa melalui CAI dengan syarat sudah mendapatkan sekolah berbasis Prancis di luar negeri selama tiga tahun, anak keturunan pendatang yang lahir di Prancis, pekerja luar negeri yang ditempatkan di Prancis, orang luar negara yang memiliki kontrak kerja minimal satu tahun di Prancis (Ferrando, 2105, pp. 150-152).

Bagi imigran yang sudah dewasa dan belum bisa berbahasa Prancis atau tidak mengetahui budaya Prancis, akan diberikan kursus gratis Bahasa Prancis selama dua bulan (180 jam) ditambah kursus orientasi kewarganegaraan selama setengah hari sebelum datang ke Prancis (Senat, 2016). Setelah itu, jika para imigran berhasil dalam tes tersebut maka akan diberikan jaminan *Intermediate multi-annual permit* atau izin untuk menetap dalam tahunan. Izin ini diharap dapat

memberi keuntungan bagi imigran dan mempermudah ketika menetap. Kartu ini merupakan kartu yang harus diperbarui setiap tahunnya hingga para imigran mendapatkan kartu izin 10 tahun. Selain itu, untuk imigran generasi muda ada tiga pendekatan yang ditetapkan pemerintah terutama generasi muda telah menjadi fokus utama sasaran integrasi Prancis (Escafé-Dublet, 2014, pp. 1-2):

1. Pendidikan, selain membantu dengan belajar Bahasa, Prancis membantu imigran untuk belajar di luar sekolah mengenai keadaan sosial Prancis.
2. Pekerjaan, kebijakan ini lebih dalam penanganan diskriminasi pada tempat kerja (perekrutan pekerja)
3. Kohesi sosial, bekerja sama dengan badan kohesi Prancis Acse non pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia di asosiasi komunitas lokal selain itu orang dewasa juga menjadi target kebijakan ini sebagai fasilitator dalam daerahnya.

Ketiga hal di atas berlaku kepada semua imigran. Sebelum sah menjadi warga negara ada masa kohabitasi dan kepatuhan pada CAI selama tiga tahun. Anak yang lahir di Prancis akan menjadi warga negara saat usianya 18 tahun dan harus dapat membuktikan bisa menjadi warganegara Prancis yang konstan atau tetap tinggal di Prancis selama lima tahun berturut-turut. Integrasi tidak hanya dilakukan oleh imigran yang baru datang saja, namun masyarakat minoritas juga harus berusaha dalam mencapai tujuan bersama ini.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konstitusi Prancis tidak mengakui adanya kelompok kecil di sekitar masyarakat sehingga membuat kelompok minoritas tidak terlihat di hadapan hukum. Undang-undang Prancis hanya melihat

masyarakatnya sebagai warganegara dan non-warganegara selain itu sebagai individu. Oleh karena itu, Prancis melihat minoritas tentu melalui basis dari prinsip republik sebagai negara Republik. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut (General Commissariat of Strategy and Prosperity, 2013):

1. Badan nasional dilihat sebagai homogen
2. Partisipasi publik pada dasarnya didasarkan pada suara dan representasi
3. Inklusi sosial melalui sekolah, tentara, tempat kerja, keluarga dll
4. Negara yang terpusat

Hal tersebut menjelaskan bahwa minoritas harus tetap percaya pada Prancis dan pemerintah agar dapat terbentuknya negara yang bersatu. Kebijakan ini telah dijalani selama 40 tahun oleh Prancis termasuk tetap dijalankan Hollande dan Macron (France24, 2018). Selain itu partisipasi setiap orang baik dalam kelompok maupun tidak akan selalu dipertanggung jawabkan dan peran mereka untuk negara harus terlihat. Inilah yang menjadi dasar bagi setiap pemerintah Prancis dalam membentuk kebijakan integrasi masyarakat. Integrasi juga perlu dilakukan agar Prancis dapat terpisah dari sikap xenofobia yang sedang meningkat.

### **3.2 Kebijakan Presiden Francois Hollande**

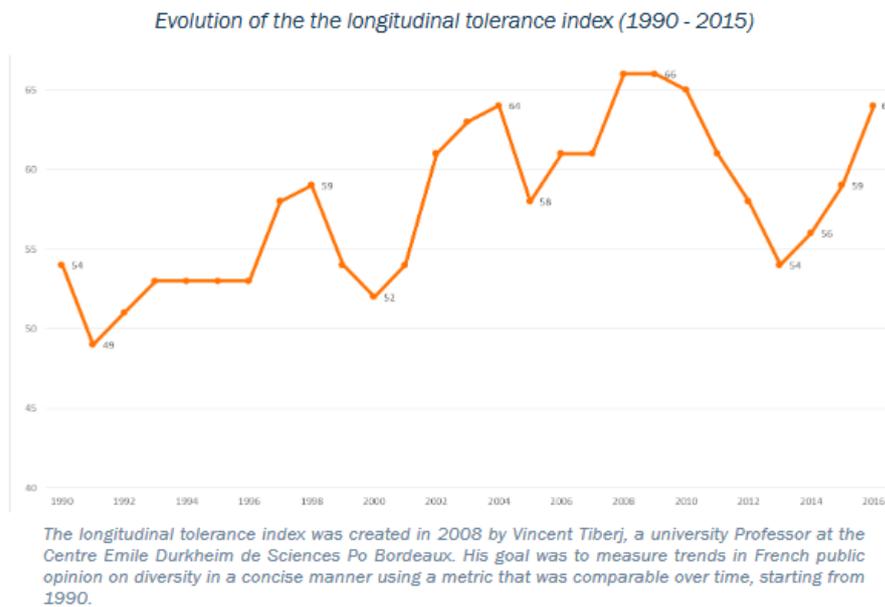
Francois Hollande adalah presiden aliran sayap kiri ke dua Prancis setelah Francois Mitterrand menjabat pada tahun 1981 lalu. Tepat pada tanggal 6 Mei 2012, Presiden yang berasal dari partai Sosialis ini berhasil menjabat sebagai Presiden ke-9 Prancis dengan jumlah suara 51,6% melawan Nicolas Sarkozy (Abis & Coustillere, 2013, p. 169). Pada awal kepemimpinannya, Hollande telah disuguhi dengan krisis ekonomi yang dialami oleh Prancis yang mulai terjadi pada tahun

2007 dan belum mengalami pemulihan. Sebagai negara dengan ekonomi tertinggi ke-5 di dunia, Hollande ingin mulai berusaha memperbaiki kegagalan Sarkozy dalam meningkatkan ekonomi sebelumnya (Spence, 2016).

Menurut Hollande beragam aspek dapat mempengaruhi krisis kali ini selain kegagalan Presiden sebelumnya. Hollande bahkan menyebutkan arus imigrasi yang tidak ditangani dengan baik juga menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Prancis. Oleh karena itu, melihat keadaan ini Hollande menginginkan agar arus imigrasi dikelola lebih baik lagi dengan memperbaiki kuota imigran dan memperketat pengawasan daerah perbatasan (Reuters, 2012)

Keadaan masyarakat sebelum Hollande terpilih juga sedang tidak stabil. Sarkozy yang menyebarkan kebencian dengan mengatakan imigran hanya berdampak buruk bagi negara tentunya membuat masyarakat terpengaruh. Masyarakat menjadi terbelah-belah dan saring memberi stereotip kepada yang lain terutama kepada imigran dan minoritas. Karena hal tersebut, Hollande melihat perlunya integrasi bersama dalam segala level karena menurutnya jika ingin Prancis bangkit, maka masyarakat harus bersatu dengan meninggalkan segala perbedaan dan harus bekerja sama dengan pemerintah sehingga akan tercapai globalisasi yang baik dan menyeluruh (Meunier, 2013, p. 236).

Toleransi di masyarakat yang sempat menurun di era kepemimpinan Sarkozy akhirnya kembali membaik setelah berada di bawah pimpinan Hollande. Data yang ditemukan oleh CNDC mengenai tingkat toleransi antar masyarakat adalah sebagai berikut:



Grafik 1. Grafik peningkatan sikap toleransi masyarakat asli (CNCDH, 2015).<sup>1</sup>

Dapat dilihat dari Grafik 3, toleransi yang ada di masyarakat Prancis sempat merosot jauh kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang berkelanjutan. Kenaikan yang jelas dimulai pada November 2014 dengan poin 56 dan Maret 2015 dengan poin 59 pada setiap kelompok masyarakat. Tentunya pemerintah juga turut berperan sedikit banyaknya dari peningkatan ini (CNCDH, 2015, pp. 3-4).

Selain masalah ekonomi yang terjadi, Prancis saat itu juga dalam keadaan krisis keamanan. Serangan-serangan yang menewaskan banyak korban jiwa dan berkelanjutan terjadi di Prancis meninggalkan kepanikan di kalangan masyarakat. Kepanikan ini berpuncak setelah serangan Paris Attack yang terjadi pada November

<sup>1</sup> Survei dilakukan oleh CNCDH yang menunjukkan tingkat toleransi masyarakat dengan Angka 0 menandakan masyarakat yang tidak toleransi sedangkan angka 100 menunjukkan masyarakat yang sangat toleransi.

2015 lalu. Hollande akhirnya mendeklarasi *state of emergency* pada tanggal 14 November 2015 hingga 26 Juli 2016 di Prancis. Dari deklarasi tersebut, langkah pertama yang dilakukan oleh Hollande adalah memberikan otoritas lebih kepada aparat kepolisian. Polisi diberikan otoritas oleh pemerintah untuk melakukan pencarian tanpa surat perintah jika terdapat kecurigaan tinggi terhadap tingkah laku masyarakat yang dapat membahayakan keamanan publik. Selain itu polisi juga diberikan otoritas untuk mengakses dan menyalin data digital yang ditemukan di tempat pencarian. Ditambah juga polisi dapat memberikan hukuman 12 jam sebagai tahanan rumah dan harus meninggalkan aktivitas luar dengan melakukan laporan pada stasiun polisi terdekat setiap tiga kali sehari (Hurriyet Daily News, 2017).

Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, polisi telah berhasil menjadikan 69 masyarakat sebagai tahanan rumah yang dicurigai. Selain itu, melalui 3.427 pencarian telah ditemukan 588 senjata dan 528 tindak kriminal. Namun keberhasilan ini tidak hanya meninggalkan jejak yang baik bagi polisi. Masyarakat yang menjadi target pencarian oleh polisi juga merasa dirugikan. Menurut Human Rights Watch, ada 40 orang datang memberikan keluhan bahwa polisi tiba-tiba saja muncul ke rumah, restoran atau tempat ibadah para terduga dan menghancurkan barang-barang yang ada serta menakuti anak-anak mereka dan melarang mereka melakukan aktivitas sehari-hari yang menghasilkan hilangnya pemasukan rumah tangga pada hari tersebut. Tidak sedikit juga dari sejumlah pencarian yang dilakukan oleh polisi merupakan pencarian yang salah target dan hanya menyisakan kerugian (Human Rights Watch, 2016)

Ada hal yang menarik dari Grafik 3 terutama jika disandingkan dengan serang-serangan yang ada di Prancis. Seiring dengan maraknya serangan yang

terjadi tetapi angka toleransi tetap meningkat. Ini menunjukkan serangan tersebut tidak begitu memberi pengaruh terhadap tingkat toleransi masyarakat. Serangan-serangan tersebut hanya menimbulkan kecemasan yang akan menentukan tingkah laku seseorang ketika bertemu dengan kelompok yang dicurigai saja.

Kebijakan-kebijakan Hollande dalam membentuk integrasi masyarakat begitu beragam terutama setelah terjadinya krisis imigran. Dengan membeludaknya imigran yang datang, Hollande tetap berjanji untuk menjaga komitmennya yaitu membuka Prancis kepada para imigran. Prancis bersama dengan Jerman menjadi negara yang paling terbuka dan mengajak negara Eropa lainnya untuk turut serta. Hollande juga membantu mengawasi keselamatan imigran dengan mengirim kapal-kapal patroli di antara Turki dan Mesir (Marlowe, 2016).

### **3.2.1 Kebijakan Terhadap Imigran dan Minoritas**

Tidak jauh seperti yang diinginkan oleh negara Prancis sebagai negara Republik, Hollande juga menginginkan agar masyarakat tetap bersatu dan terbentuk masyarakat yang homogen. Setelah menjadi presiden, pidato pertama yang dilakukan oleh Hollande mengenai imigran adalah keinginannya untuk melawan sikap anti-imigran yang sedang berkembang di masyarakat (yang menganggap imigran hanya menjadi beban negara dan merampas segala hak warga negara Prancis). Selain itu, Hollande tidak menyetujui pendapat-pendapat orang yang menuntut agar aturan perbatasan lebih dipersulit lagi karena prinsip dari *free movement* ingin ditegakkan. Hollande juga menekan EU untuk lebih tegas terhadap penanganan imigran yang masuk ke Eropa dan mengontrol batas-batas eksternal yang ada (UNIAN, 2016).

Hollande melihat keadaan Prancis saat itu mudah diprovokasi. Provokasi di sini lebih mengarah kepada meningkatnya xenofobia baik karena pihak-pihak sayap kanan hingga kepada serangan-serangan yang menghasilkan kebencian. Hollande menekankan kepada masyarakat seharusnya masyarakat Prancis saat ini dapat bersatu dengan tidak memberikan ruangan terhadap wacana-wacana yang dapat memanipulasi ketakutan kepada orang asing (Samuel H. , 2014).

Hollande pun berbicara tegas dalam merespon tuntutan serentak masyarakat yang ingin menutup gerbang untuk imigran. Hollande mengatakan bahwa jika Eropa memilih untuk menutup diri dari imigran berarti sama saja ingin membawa negara jauh dari globalisasi. Hollande ingin menunjukkan bahwa Prancis bisa menjadi lebih baik dengan membuka pintu bagi para imigran. Prancis harus menjadi negara yang mewakili segala individu tidak peduli faktor apapun yang membedakan. Hollande juga berjanji memberikan hak memilih kepada minoritas yang haknya belum tersalurkan. Menurut Hollande, konstitusi Prancis harus direvisi dengan melibatkan dua pertiga mayoritas di parlemen agar konstitusi yang ada dapat merepresentasikan seluruh masyarakat (McPartland, 2014).

Prancis akan terus menerima imigran terutama dalam masa krisis imigran pada tahun 2015 dan berjanji bahwa Prancis akan selalu menjadi negara yang bebas. Hollande hanya akan melakukan limitasi kepada imigran dengan tujuan ekonomi bukan yang mencari suaka. Dengan segala penerimaan ini, Hollande akan tetap meningkatkan keamanan daerah perbatasan dengan tetap menjaga nilai negara dan tanpa mempersulit proses masuknya imigran (ABC News, 2015). Penerimaan ini dikatakan sebagai pekerjaan moral dan harus dilakukan terutama dalam menerima pencari suaka. Bahkan Prancis bersedia menerima 1.000 imigran yang seharusnya

ke Jerman sebagai aliansi terdekat di dalam EU. Prancis juga bertekad untuk menangani penyebab eksodus pengungsi dari Timur Tengah, Asia dan Afrika dengan meningkatkan tindakan terhadap gerakan militan Islam. Selain itu, peningkatan hubungan koalisi juga dirasa penting bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam memerangi gerakan ekstremis di Timur Tengah (Pineau, 2015).

Bersama dengan Jerman, Hollande berkomitmen untuk tetap mendukung keputusan EU dalam menerima imigran dengan permanen dan sistem mandatory. Hollande menekankan bahwa imigran yang masuk ke Eropa akan lebih baik lagi jika distribusi dengan lebih adil lagi pada setiap negara. Namun Hollande tidak menyetujui penyebaran tersebut menggunakan sistem kuota dari EU karena daerah perbatasan Prancis menetapkan aturan-aturan dan kebijakan bagi tiap imigran sendiri, sehingga tidak sembarang imigran dapat memasuki Prancis. Keputusan ini dilakukan meninjau dari angka pengangguran yang sedang dialami Prancis. Prancis tidak ingin menambah pengungsi masuk ketika belum bisa memberikan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi para pengungsi. Hal tersebut hanya akan menjadi pelayanan buruk bagi mereka. Hollande hanya akan menerima imigran dengan prospek ke depan yang lebih baik dan bukan hanya menganggap bahwa Eropa merupakan kontinen yang menjanjikan namun tidak berusaha untuk memperbaiki kehidupan sendiri (Borger, Kassam, & Neslen, 2015).

Selain itu, pada masa Hollande Prancis sedang mengalami keamanan yang tidak stabil diakibatkan adanya ancaman teroris, efek *spillover* dari kegagalan negara tetangga dan pemberontakan Rusia di Ukraina. Dengan keadaan tersebut, Hollande mempertegas bahwa kebijakan dalam negeri dan luar negeri Prancis tidak akan jauh berbeda dalam menanggapi ketidakstabilan tersebut. Dengan

menambah peran militer di dalam negeri dan meningkatkan angka tentara yang dikirim serta misil yang diluncurkan dalam melawan gerakan ekstrem, Hollande bertujuan untuk menjauhkan negaranya dari teroris-teroris yang mengancam bersama dengan aliansi (Galbert, 2015).

Prancis juga merupakan negara yang memiliki kelompok radikal Islam dengan angka tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Karena hal tersebut, Hollande mencoba mengeluarkan kebijakan *Security and Counter Terrorism Act pada Desember 2012*. Kebijakan ini memperbolehkan pihak otoritas menyita paspor dan melarang orang bepergian ke Suriah dan Irak dengan tujuan mengikuti organisasi yang berbau radikal. Selain itu, pemberian hukuman yang lebih berat juga ditetapkan kepada pelaku teroris agar timbulnya efek jera. Pemerintah juga akan memblokir setiap website Islam yang dapat diakses di Prancis (Pineau, 2015)

Selain itu, setelah serangan kereta api Thalys Amsterdam-Paris, Hollande menekankan Prancis untuk mempersiapkan diri jika ada serangan lainnya. Dengan *Operation Sentille*, Prancis ingin meningkatkan keamanan di daerah perbatasan. Mobilisasi aparat polisi dan gendarmerie (polisi militer) 7000. Memperbanyak agen intel dan modernisasi undang-undang aksi lebih efektif. Dirasa akan membantu dalam lokasi dan melawan gerakan fundamental dan *foreign fighters*. Prancis harus beraksi secara manusiawi pada tingkat Eropa dan internasional tetapi tetap tegas terhadap imigran (France Embassy, 2015)

Kemudian kebijakan Hollande selanjutnya yaitu adopsi *surveillance act* atau meningkatkan legislasi anti-ekstremis yang memperoleh otoritas

menggunakan “black-boxes” pada penyedia layanan internet dengan tujuan memonitor aktivitas yang dapat dicurigai sebagai teroris. Selain itu, bagi para pencari suaka, Hollande melakukan transformasi legislasi imigran dengan mempercepat aplikasi formulir pencari suaka yang semula hingga 24 bulan menjadi 9 bulan. Para pencari suaka ditempatkan di kamp spesial di seluruh penjuru negara. Dengan tujuan mempercepat integrasi imigran legal yang ada di Prancis.

Keberhasilan Hollande dengan layanan keamanan Prancis telah melarang 200 orang meninggalkan Prancis dan penolakan terhadap catatan 50 orang yang ingin masuk ke Prancis dikarenakan adanya kecurigaan aktivitas kelompok ekstremis. Selain itu, aparat Prancis juga telah melakukan 3.336 pencarian administratif, 290 orang menjadi tahanan rumah dan 344 telah ditahan (le Figaro, 2016).

### **3.2.2 Usaha dalam Meredam Sikap Xenofobia Masyarakat**

Dari awal menjabat, Hollande berkomitmen untuk memerangi sikap xenofobia yang ada di masyarakat terutama hingga menimbulkan diskriminasi. Hollande berjanji untuk memerangi segala tindakan diskriminasi dalam sektor perumahan dan perekrutan. Hollande memilih untuk melakukan operasi “tes” untuk mengetahui tingkat diskriminasi yang ada pada perusahaan yang memiliki lebih dari 1.000 pegawai. Selain itu, akan dilakukan dialog bersama dengan perusahaan tersebut mengenai proses penerimaan pekerja. Bagi para pekerjanya, pemerintah mencoba meminta para pendaftar kerja dengan “blind CVs”. Dari CV tersebut, perusahaan menerima lamaran kerja tanpa mengetahui nama dan alamat para pelamar. Walaupun terbukti adanya diskriminasi dari perusahaan, hukuman tetap

tidak bisa dijatuhkan karena adanya pembatasan tuntutan hukum individu (Vinocur, 2015)

Dengan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan, Hollande memiliki beberapa prioritas dalam melawan diskriminasi, gerakan radikal dan xenofobia:

- Pencegahan aktivitas ekstremis baik dalam media Online maupun turun di lapangan.
- Mencegah terjadinya imigrasi secara ilegal.
- Pembuatan infrastruktur yang memadai bagi para imigran legal.
- Melawan xenofobia dan rasisme dengan cara apapun.
- Memastikan terjalinnya hubungan antar etnis yang ada di Prancis dengan damai.
- Mendorong proses integrasi antara pengungsi dan orang lain (*travellers*)

Pada 17 April 2015, Hollande telah melakukan langkah yang cukup signifikan dengan *New National Plan of Action to Counter Racism and Anti-Semitism* hingga 2017. Kebijakan ini berisikan mengenai perlawanan terhadap sikap xenofobia, mobilisasi sosial terhadap penentangan sikap xenofobia dan revisi kebijakan kewarganegaraan dalam melawan xenofobia. Selain itu, pemerintah juga menjamin pemahaman situasi di Prancis sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik lagi terutama pada konsekuensi sikap tersebut dengan lebih efektif dan mendidik. Memberi Pendidikan melalui sekolah mengenai nilai Prancis juga menjadi sasaran penting bagi minoritas (Premier Ministre, 2014, pp. 5-7).

Kampanye organisasi ini berkaitan dengan kesadaran publik dalam mendukung minoritas. Selain itu, perlindungan fiskal juga diberikan kepada

sekolah-sekolah agama Yahudi dan Islam, tempat-tempat beribadah dan infrastruktur-infrastruktur milik minoritas lainnya. Hollande juga membentuk departemen nasional khusus yang menangani provokasi kebencian dan hal-hal yang berkaitan di media sosial. Hollande juga menganggap perubahan segera dibutuhkan mengenai hukum kriminal Prancis dan mulai memperkenalkan rasisme dan anti-Semitisme sebagai keadaan yang mengganggu di dalam setiap pelanggaran. Peraturan tersebut juga melibatkan sikap sexism sebagai hal yang mengganggu publik dan akan dijadikan sebagai tindak kriminal (Gilles, 2015).

Tidak hanya itu, Prancis banyak menghadiri konferensi-konferensi dalam level nasional, level Eropa hingga level internasional. Prancis memilih untuk melakukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga lainnya dalam pembahasan isu ras dan diskriminasi. Prancis juga turut aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia dan juga aktif dalam konferensi internasional mengenai hak asasi manusia.

Dalam level nasional, Prancis telah berkomitmen untuk menandatangani konvensi mengenai *Elimination of Racial Discrimination*. Sesuai dengan konvensi tersebut, Prancis membentuk rencana kebijakan nasional untuk melawan segala bentuk rasisme dan anti-semitisme yang akan dipimpin oleh Menteri di Prancis. Cara kerjanya, setiap Menteri harus mengkoordinasikan sejumlah departemen pemerintahan dengan memiliki perwakilan dalam konsistensinya memerangi xenofobia di lapangan serta membuat proposal dan mendorong masyarakat dalam bekerja sama dan menilai kemajuan usaha tersebut. Setiap delegasi juga bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi dari rencana nasional Prancis serta mengkoordinasi pertemuannya bersama dengan *Inter-Ministrial Committee to Fight Racism and Anti-Semitism (CILRA)* yang sudah ada sedari tahun 2003.

Rencana ini dikeluarkan pada Februari 2012 lalu. Keberhasilan lain adalah Prancis telah membentuk suatu badan legislasi kriminal yang fokus dalam menangani kebijakan perkembangan Pendidikan, budaya dan olahraga. Kebijakan-kebijakan tersebut harus menentang segala tindakan xenofobia dan mempromosikan kesetaraan kesempatan bagi siapapun. Badan ini menjadi contoh bagi dunia dalam memerangi xenofobia dan juga ketidak setaraan.

Dalam level Eropa, Prancis mendukung Council of Europe yang menangani isu xenofobia melalui *European Commission against Racism and Intolerance*. Selain itu kerjasama juga dilakukan bersama *Organisation for Security and Cooperation in Europe* dengan mendukung program-program yang dijalankan yaitu the Tolerance and Non-Discrimination Department. Prancis juga mendukung diadopsinya keputusan kerangka kerja dalam melawan bentuk-bentuk tertentu dalam ekspresi rasisme dan xenofobia melalui hukum pidana. Kemudian dalam level internasional, Prancis merupakan bagian dari *International Convention on All Forms of Racial Discrimination*. Berbagai laporan sikap xenofobia yang berkelanjutan harus dikumpulkan oleh Prancis dan juga implementasi dalam menangani hal tersebut (France Diplomatie, 2013).

Komitmen dari segala bagian yang diambil Prancis ditunjukkan utamanya dalam level nasional. Pemerintah tidak segan melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan xenofobia dan yang mengancam keamanan serta perdamaian nasional agar pemikiran xenofobia tidak cepat menyebar seperti pelarangan segala aktivitas perkumpulan yang pernah dilakukan oleh kelompok Pegida yang merupakan kelompok anti-imigran 2016 lalu (Glasser, 2016). Selain itu pemerintah Prancis turut mempromosikan hak asasi manusia sesuai dengan aturan EU dengan

dipermudahnya kependudukan bagi Pencari suaka. Pencari suaka bahkan diberikan jaminan hak oleh pemerintah (The Law Library of Congress, 2016).

### **3.3 Kebijakan Presiden Emmanuel Macron**

Pada tanggal 7 Mei 2017 lalu, Presiden Emmanuel Macron dilantik menjadi presiden Prancis setelah berhasil mengalahkan partai sayap kanan Marie Le Pen suara 66,1%. Dengan partai barunya La Republique En Marche, Macron berjanji untuk mengembalikan keadaan Prancis menjadi negara yang aman dan damai terutama keadaan masyarakat Prancis yang penuh dengan kecemasan akibat kampanye anti-imigran Le Pen. Selain itu, ancaman teroris dan krisis imigran juga masih menjadi isu yang belum terselesaikan hingga Macron menjabat (Walt, 2017).

Menurut CNCDH, tingkat toleransi pada tahun 2017 di Prancis sebanyak 64 poin. Poin sebanyak ini dikatakan sebagai poin yang stabil meningkat dari tahun 2016. Penurunan hanya dialami oleh minoritas kulit hitam dan komunitas Roma. Namun penurunan ini tidak dianggap berarti karena hanya sebesar 2 hingga 3 poin saja. Tingkat ini juga dikatakan cukup tinggi mengingat keadaan Prancis yang telah diserang oleh beberapa teror, peningkatan pengangguran, lawan dalam pekerjaan hingga meningkatnya xenofobia. Data menandakan hal-hal tersebut tidak langsung berpengaruh terhadap tekanan toleransi antar masyarakat (CNCDH, 2017, pp. 8-9).

#### **3.3.1 Kebijakan Terhadap Minoritas dan Imigran**

Langkah pertama yang dilakukan oleh Macron setelah menduduki kursi pemerintah adalah membentuk *National Assembly* atau majelis nasional. Dalam majelis nasional, Macron juga telah melibatkan minoritas untuk mengambil andil

dalam pemerintahan. Macron berhasil mengangkat 35 anggota parlemen sebagai perwakilan rakyat yang berasal dari minoritas. Hal tersebut merupakan peningkatan dibandingkan pada masa Hollande yang hanya menduduki 18 kursi (Marmouyet & Houeix, 2017).

Tujuannya didirikannya majelis nasional inti tentu untuk mempercepat implementasi segala janji yang dikatakan ketika kampanye. Salah satu janji tersebut berkaitan dengan krisis imigran. Sama halnya dengan Hollande, Macron juga menerima imigran datang ke Prancis. Macron menganggap bahwa Prancis harus memberi andil terhadap permasalahan dunia terutama peran dalam memberikan kesempatan bagi imigran. Walaupun Prancis membuka negara bagi para pencari suaka, namun Macron menginginkan agar penerimaan tersebut dibatasi. Macron mengatakan bahwa tidak ada budaya Prancis melainkan yang ada hanya budaya yang beragam di Prancis (Joseph, 2017).

Di tahun pertama menangani gelombang migrasi yang belum stabil. Melalui kebijakan *balance* yang mana merupakan gabungan antara *humanity* yaitu menghargai obligasi internasional Prancis mengenai hukum suaka dan *firmness* yaitu menimbang secara koersif terutama dalam hal pengusiran. Kebijakan jangka Panjang harus dipikirkan dengan matang jika terlalu cepat ditakutkan akan melawan kepentingan negara terutama sistem imigrasi yang kompleks dan interdependen (Bertossi & Tardis, 2018, pp. 25-27).

Keinginan untuk tetap tegas namun tidak menyalahi hak terus dilakukan oleh Macron. Melihat keadaan jalanan Prancis yang dipenuhi oleh imigran membuat Macron menjadikan 62 Motel dengan harga murah sebagai tempat

penampungan para imigran tersebut dapat menampung 6.000 imigran. Melihat penutupan kamp Calais tahun lalu juga membuat Macron memilih kebijakan tersebut agar tensi di masyarakat juga menurun. Polisi menemukan sebanyak 2.771 imigran yang terlantar di jalan. Bahkan setelah kamp ditutup, sekitar 600 imigran mencoba untuk kembali mendirikan kamp sendiri bahkan hingga tidur di kayu-kayu dan taman di Calais. Macron mengatakan kebijakan ini agar dapat mempermudah pencari suaka masuk ke Prancis dengan alasan perang dan kekerasan serta mendeportasi imigran dengan alasan ekonomi. Macron menginginkan dibangun tempat penampungan pada daerah-daerah krusial Prancis agar tidak ada imigran yang tidur di jalan (Sage & Magnanville, 2017).

Selain di dalam negeri, Macron juga berusaha menanggulangi masalah imigrasi di luar negara. Seperti menanggulangi penyelundupan orang yang terjadi di perbatasan, meningkatkan stabilitas di Libia sebagai salah satu negara yang menyumbang banyak imigran di Prancis dan meningkatkan bantuan pada negara-negara transit sebelum imigran menuju Prancis. Libia, Nigeria dan Chad juga harus bersedia membantu Prancis dalam proses permintaan suaka yang dilakukan oleh imigran di ketiga negara. Selain diskusi bersama dengan ketiga negara tersebut, Prancis juga mengajak Italia, Jerman serta Spanyol membahas mengenai penempatan 10.000 pengungsi di Prancis (BBC, 2017). Pertemuan tersebut membahas mengenai arus imigran yang datang ke Eropa karena kemiskinan, perang dan keadaan politik dari Timur Tengah dan Afrika. Macron menekankan harus adanya kerja sama antar EU dan Uni Afrika melalui pendekatan “solidaritas, kemanusiaan dan efisien” terhadap arus imigrasi ini. Dalam akhir pertemuan ini, ketujuh negara akhirnya menemukan kesepakatan bersama. Salah satunya adalah

Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol bersedia untuk mengirimkan bantuan kepada Chad dan Nigeria dalam mengatur masalah perbatasan dengan syarat diberhentikannya imigran dari Afrika Utara menuju Eropa (Wintour & Willsher, 2017).

Kemudian, Macron juga terlibat aktif dalam perumusan rencana-rencana yang akan diadopsi oleh EU mengenai imigran. Pada tanggal 26 September 2017, Macron melakukan pidato *Initiative for Europe* di hadapan negara-negara Eropa lainnya. Dalam pidatonya ini, Macron berpendapat bahwa selain integrasi domestik di dalam negara, perlu adanya juga integrasi yang lebih ketat lagi pada EU dalam menghadapi isu-isu bersama. Dua hal yang menjadi pokok pembahasan dari pidato Macron merupakan isu keamanan dan pertahanan dalam konteks aliansi bersama Amerika Serikat dalam melawan teroris dan isu imigrasi. Bekerja sama akan sangat penting baik untuk mencegah masalah di dalam negeri sendiri ataupun di luar.

Macron juga akan bersedia menerima imigran di Prancis bersama dengan Merkel sebagai pencetus dari keterbukaan ini. Menurutnya, pilihan untuk menutup daerah perbatasan adalah pilihan yang salah dan tidak efektif karena melawan nilai kesetaraan EU. Macron menekankan kepada negara-negara EU untuk lebih harmonis lagi dalam membentuk kebijakan nasional atas imigran dan pencari suaka sesuai dengan nilai EU. Selain itu, data mengenai situasi imigran dan program dengan tujuan integrasi harus selalu diperbarui agar kebijakan juga dapat berkembang menyesuaikan keadaan (Wiley Online Library, 2017, p. 759).

Kelanjutan dari pertemuan ini dilaksanakan di Brussels pada tanggal 24 Juni 2018. Pertemuan ini membahas mengenai perbedaan setiap negara dalam mengatasi

imigran yang datang serta mengenai imigran dengan alasan ekonomi yang datang ke Eropa. Perlu adanya reformasi rencana kebijakan imigran selanjutnya. Merkel dan Macron memiliki tujuan yang sama dengan mengajak 28 negara EU lainnya dalam pembentukan *single immigration plan*. Rencana ini masih perlu menempuh jalan yang Panjang karena belum adanya konsekuensi ataupun kesimpulan apapun dalam pertemuan tersebut terutama karena penolakan imigran dari negara-negara Eropa timur masih tinggi. Bahkan Republik Czech, Hungaria, Polandia dan Slovakia memilih untuk tidak menghadiri pertemuan ini karena kebijakan yang diusung tidak sesuai dengan kepentingan negara. Selain itu, pembicaraan ini melibatkan kerja sama negara-negara transit imigran sebelum masuk ke Eropa seperti Turki. Pertemuan ini masih akan berlanjut terutama rencana bersama yang masih belum menemukan titik terang (France24, 2018).

Prancis merupakan negara dengan kebijakan yang paling terbuka terhadap imigran bersama dengan Jerman. Walaupun membuka diri, Macron tidak ingin penjagaan dikurangi atas perbatasan. Macron ingin memperkuat kebijakan imigran namun tetap terbuka melalui proposal yang disusun dan dipublikasi pada Februari 2018 dan akan dirundingkan oleh parlemen selanjutnya. Proposal ini berisikan mengenai isu imigran, pencari suaka dan integrasi utamanya memperbaiki prosedur imigrasi ilegal, pencari suaka hingga kriminalisasi bagi pihak manapun yang membantu imigran ilegal (Lotem, 2018).

Proposal ini fokus dalam menggaris bawahi dipercepatnya prosedur suaka bagi para imigran yang membutuhkan, meningkatkan infrastruktur kamp-kamp pengungsi serta mempercepat deportasi bagi mereka yang tidak memenuhi syarat suaka misalnya hanya datang karena alasan ekonomi (Chassany, 2017). Selain itu

di dalam proposal tersebut, pihak otoritas dapat menggandakan waktu penahanan suaka yang gagal hingga 90 hari serta mengurangi masa penangguhan yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin segala hak pencari suaka di Prancis terjamin. Kebijakan ini ditekan oleh Macron karena tahun 2017 lalu, Prancis menerima aplikasi suaka terbanyak hingga mencapai 100.000 aplikasi. Proposal ini telah diserahkan kepada parlemen untuk dirundingkan. Proposal ini telah dibahas dalam tujuh hari debat hingga lulus seleksi pertama dari Majelis Nasional pada tanggal 23 April 2018. Proposal masih dirundingkan dalam seleksi ke dua oleh Senat untuk disetujui (Sayer, 2018).

Banyak yang tidak setuju dengan jalur yang Macron pilih terutama karena sikap xenofobia masyarakat yang sedang meningkat. Banyak NGO, pengacara hingga pekerja pemerintahan tidak setuju dengan kebijakan Macron. Bahkan, Sonia Krimi yang merupakan pembuat undang-undang dari partai Macron mengatakan kebijakan kali ini “bermain dengan ketakutan masyarakat”. Sama halnya dengan Krimi, Mathieu Orphelin juga mengkritik kebijakan ini. Kebijakan ini dianggap tidak sesuai dengan hak pencari suaka. Kebijakan ini menjadi kebijakan yang populer di kalangan masyarakat xenofobik dilihat dari survei yang dilakukan oleh ABVA yang menunjukkan 63% masyarakat menganggap di Prancis sudah terlalu banyak imigran (Carriat & Melander, 2018). Macron disebut telah mencoreng nilai kemanusiaan Prancis akibat kebijakan ini. Tetapi Macron tetap meyakinkan pilihan ini adalah pilihan yang terbaik bagi masyarakat dan imigran.

Selain itu, dalam proposal ini Prancis juga mendeskripsikan mengenai langkah lima tahun ke depan dalam melawan teroris. Setelah melihat keadaan Prancis, Macron berpendapat bahwa adanya beberapa ancaman negara. Keamanan

internal yang berhubungan dengan keamanan eksternal dan imigrasi. Macron telah menyusun rencana lima tahun ke depan administrasinya dalam melawan terorisme. Melalui *daily security force* yang melibatkan polisi dan gendarmerie dalam melawan gerakan radikalisme dan reformasi prosedur suaka. Sebanyak 10.000 polisi dan gendarmerie tambahan dikerahkan dengan teknologi dalam operasi. Polisi dan gendarmerie juga bertanggung jawab terhadap penanganan segala ancaman verbal maupun fisik terhadap publik (France24, 2017). Prancis juga bekerja sama dengan Inggris dalam melawan gerakan radikal di media sosial. Melalui konferensi yang dilakukan kedua negara, Prancis dan Inggris ingin agar platform seperti Google dan Facebook melarang penyebaran konten radikal dalam situs mereka. Inggris dan Prancis juga ingin membentuk hukum wajib bagi platform dengan memberi hukuman jika terjadi kegagalan (BBC, 2017).

### **3.3.2 Usaha dalam Meredam Sikap Xenofobia Masyarakat**

Terpilihnya Macron sebagai Presiden menurut masyarakat merupakan langkah menjauhi xenofobia. Namun, usaha untuk memerangi sikap xenofobia tidak cukup hanya itu saja. Macron harus berani dalam bertindak cepat mewujudkan segala hal yang dijanjikan saat kampanye. Sedari kampanye, Macron sudah menunjukkan dukungannya terhadap keberagaman budaya di Prancis (Kupe, 2018). Macron bahkan mengatakan keinginannya untuk membantu integrasi minoritas terutama Muslim sebagai minoritas terbanyak di Prancis.

Dari awal kampanye, Macron sudah menarik perhatian masyarakat. Saingannya adalah seorang dari partai sayap kanan yaitu Marine LePen yang terkenal dengan kebijakan anti-imigrannya. Selain berhasil dalam menjauhkan Prancis dari xenofobia, Macron juga berhasil menegakkan nilai-nilai EU yaitu

institusi demokratis, hak asasi dan aturan hukum. Macron juga mengkritisi negara-negara dengan pemerintah sayap kanan seperti Hungaria dan Polandia. Kedua negara tersebut tidak ingin menerima imigran kembali karena xenofobia juga telah meningkat.

Macron memerangi diskriminasi dalam dua sektor yaitu perumahan dan perekrutan. Sama halnya dengan Hollande, Macron juga akan melakukan tes bagi perusahaan-perusahaan besar dan sektor-sektor negara di Prancis mengenai hal pekerjaan dan keberagaman mereka dalam menerima pekerja. Macron memanggil 120 perusahaan dan menuntut mereka untuk memerangi diskriminasi kepada minoritas manapun. Tes yang sudah dilakukan Macron yaitu mengirim CV satu identitas dalam perusahaan yang berbeda dan dengan nama yang berbeda untuk membandingkan respon. Selain itu Macron berjanji untuk melawan *house sentencing* yang memerangkap minoritas di daerah yang tidak menguntungkan (France24, 2018).

Awalnya masyarakat Prancis percaya bahwa Macron akan mengurangi peningkatan xenofobia di Prancis. Prancis bahkan mendukung aktivis anti rasisme di Amerika Serikat (First Post, 2017). Namun kebijakan Macron menjadi bias dan menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Proposal yang diajukan baru-baru ini dinilai sebagai tindakan yang tidak mencerminkan negara demokrasi dan mencoreng hak asasi manusia. Namun, partai Macron tetap bersikukuh bahwa harus ada yang dikorbankan jika ingin mencapai suatu hasil yang lebih baik. Media mainstream tidak terlalu menggali xenofobia yang terjadi pada masa ini. Faktanya yang tertinggal seperti diskriminasi terhadap generasi muda masih terjadi terutama dari polisi. Diskriminasi bahkan terjadi hanya dari nama dan area tempat

tinggal (Raj & Ward, 2018). Selain itu, Hukum baru anti-terorisme Prancis yang baru disahkan pada tanggal 1 November lalu resmi sebagai akhir dari *state of emergency* setelah dua tahun. Tapi menurut masyarakat, hukum ini tidak berjalan sesuai yang dijanjikan Macron. Hukum ini sama dengan hukum sebelumnya yaitu hanya menjatuhkan hukuman kepada kriminal biasa.

Setelah memimpin selama satu tahun lebih sejauh ini, belum banyak terlihat rencana-rencana Macron dalam memerangi xenofobia di Prancis. Macron masih memiliki tugas-tugas lainnya dalam memenuhi janjinya sebagai partai sayap kiri dan terbuka terhadap imigran. Macron harus menyusun segala rencana dalam memerangi sikap xenofobia masyarakat dalam sisa masa kepemimpinannya sehingga janji kampanyenya dapat terpenuhi.

Tabel perbandingan kebijakan Hollande dan Macron:

**Tabel 1**

<b>Kebijakan</b>	<b>Hollande</b>	<b>Macron</b>
Kebijakan Imigran dan Minoritas	Membuka perbatasan bagi para imigran dan menghargai <i>free movement</i>	Membuka perbatasan bagi para imigran dan menghargai <i>free movement</i>
	Menerima sistem EU dalam menyebarkan seluruh imigran yang datang pada setiap negara EU sesuai dengan kuota negara masing-masing	Berperan dalam perumusan kebijakan imigran bersama dengan EU dan reformasi menuju <i>single immigration plan</i>

Membuka Prancis terhadap imigran pencari suaka dan membatasi imigran dengan tujuan ekonomi	Membuka Prancis terhadap imigran pencari suaka dan mempercepat masa deportasi imigran dengan tujuan ekonomi
Aturan perbatasan harus ditegakkan dengan baik	Aturan perbatasan harus dipersulit agar imigran ilegal tidak bisa masuk ke Prancis
Memberikan otoritas bagi militer, polisi, gendarmerie di dalam dan di perbatasan Prancis	Menambah jumlah polisi, militer dan gendarmerie di dalam dan perbatasan Prancis
Fokus kerjasama dengan Timur Tengah, Asia dan Afrika	Fokus kerjasama dengan Libia, Nigeria, Chad
Menutup kamp Calais yang dikatakan tidak pantas	Menjadikan 62 motel sebagai tempat tinggal imigran yang tidak memiliki rumah akibat ditutupnya kamp di Calais
Security and Counter Terrorism Act pada Desember	Tergabung dalam Proposal dengan menambah peran polisi, militer dan gendarmes disertai teknologi yang lebih canggih

	<p><i>Surveillance act</i> pengawasan melalui black-boxes</p>	<p>Bekerja sama dengan Inggris melalui hukum wajib bagi Facebook dan Google dalam melarang penyebaran konten radikal</p>
	<p>Meningkatkan koalisi bersama Amerika Serikat</p>	<p>Meningkatkan koalisi bersama Amerika Serikat dan membentuk kerjasama antara EU dengan Uni Afrika</p>
Melawan xenofobia	<p>Sektor perumahan dan perekrutan: Operasi Tes kepada perusahaan-perusahaan dengan pegawai di atas 1.000 orang</p>	<p>Sektor perumahan dan perekrutan: Operasi tes kepada perusahaan-perusahaan besar dan sektor-sektor Prancis Memberikan tempat penampungan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Departemen nasional melawan provokasi media sosial</li> <li>- Konferensi mengenai anti xenofobia di lokal, regional dan internasional</li> </ul>	